

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Berbasis Kesesuaian Tata Ruang dan Potensi Wilayah

Fauziya Bagawat Sari

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

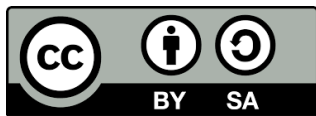
Email: fauziahbagawat@unkris.ac.id

Keywords:

Fisheries Port, Spatial Planning, Feasibility Study, Regional Development, Ambon.

Abstract

Fishing ports support fisheries logistics and coastal development, but their expansion requires alignment between infrastructure needs, spatial planning, and regional potential. This study aimed to assess the basis and directions for developing the Ambon Nusantara Fishing Port through an integrated regional planning framework. A descriptive quantitative approach combined spatial analysis and policy review using spatial planning documents, fisheries statistics, regulations, feasibility study documents, and field observations. The analysis incorporated Geographic Information Systems, assessments of terrestrial and marine spatial planning consistency, SWOT analysis, and synthesis of infrastructure needs and regional potential. The findings indicated that the port's location and functions were supported by the spatial planning documents examined. Its position within Fisheries Management Area 714 and its service connections with Areas 715 and 718 strengthened its strategic role in vessel services, fish landing, logistics, distribution, and fisheries industries. Nevertheless, limited facilities and suboptimal operational efficiency constrained development. These findings highlight the need to integrate terrestrial and marine spaces, improve infrastructure capacity and logistics connectivity, and strengthen institutional coordination while considering environmental sustainability and climate risks. The study concludes that spatial compatibility and regional potential provide an indicative planning basis for port development, although financial feasibility requires further investigation before investment decisions.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by AL-Makki Publisher

Kata Kunci:

pelabuhan perikanan, tata ruang, studi kelayakan, PPN Ambon, pengembangan wilayah.

Abstrak

Pelabuhan perikanan mendukung logistik perikanan dan pembangunan wilayah pesisir, tetapi pengembangannya memerlukan keselarasan antara kebutuhan infrastruktur, tata ruang, dan potensi wilayah. Penelitian ini bertujuan menilai dasar dan arahan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melalui kerangka perencanaan integratif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memadukan analisis spasial dan telaah kebijakan. Data bersumber dari dokumen tata ruang, statistik perikanan, regulasi, dokumen studi kelayakan, serta pengamatan lapangan. Analisis meliputi Sistem Informasi Geografis, penilaian kesesuaian tata ruang darat dan laut, SWOT, serta sintesis kebutuhan prasarana dan potensi wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi dan fungsi pelabuhan memperoleh dukungan dari dokumen tata ruang. Kedudukannya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 714 serta keterkaitan pelayanan dengan wilayah 715 dan 718 memperkuat peran strategisnya dalam pelayanan kapal, pendaratan ikan, logistik, distribusi, dan industri perikanan. Namun, keterbatasan fasilitas dan efisiensi operasional yang belum optimal menjadi kendala pengembangan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya integrasi ruang darat dan laut,

peningkatan kapasitas infrastruktur, penguatan konektivitas logistik, dan koordinasi kelembagaan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta risiko perubahan iklim. Penelitian menyimpulkan bahwa kesesuaian tata ruang dan potensi wilayah memberikan dasar perencanaan indikatif bagi pengembangan pelabuhan. Meskipun demikian, kelayakan finansial investasi belum dapat dipastikan dan memerlukan kajian lanjutan yang didukung data operasional serta perhitungan biaya dan manfaat.

PENDAHULUAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon adalah salah satu Unit Pelayanan Teknis yang dibangun Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada semua stakeholder serta operasional kapal-kapal perikanan (Fauzi, 2019). Sejak dioperasikan pada tahun 1997 dengan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sampai dengan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara pada tahun 2000, PPN Ambon telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan perikanan di Maluku khususnya kegiatan perikanan tangkap. Dengan fasilitas yang dimiliki, PPN Ambon selama ini mendukung aktifitas penangkapan ikan pada ketiga WPP potensial yakni WPP 714, WPP 715 dan WPP 718 mulai dari tambat labuh, bongkar muat, penyediaan logistik, pembinaan nelayan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan sampai dengan tumbuhnya industri perikanan melalui kawasan industri perikanan yang dimiliki PPN Ambon (Schwartz-Belkin & Portman, 2023).

(Hossain et al., 2021) Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon di provinsi Maluku dan ketersediaan potensi sumber daya laut yang dimiliki di ketiga WPP yang disebut juga sebagai golden triangle fishing ground, maka pemerintah menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Dalam kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku No. 02/MEN-KP/KB/VIII/2014 dan No. 523.33/345/VIII/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan guna Mendukung Provinsi Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (Vasquez Caballero et al., 2023; Bakker et al., 2019). Tujuan dari ditetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, lestari dan secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya serta memicu pengembangan industri pengolahan ikan sehingga memerlukan infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan perikanan (Li & Jay, 2023; Jefferson et al., 2023). Untuk itu PPN Ambon dituntut agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas agar lebih berkompeten yang ada serta peningkatan sumberdaya manusia agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan. Dukungan PPN Ambon dibuktikan dengan terlibatnya PPN Ambon sebagai salah satu anggota dalam Badan Pengelola Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku yang diangkat dengan Peraturan Gubernur Maluku No.19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pengelola Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku.

Kajian pengembangan pelabuhan perikanan sering menempatkan aspek teknis pelabuhan, potensi sumber daya ikan, dan kebijakan tata ruang sebagai bagian analisis yang terpisah. Dalam konteks PPN Ambon, kebutuhan pengembangan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas fasilitas, tetapi juga dengan konsistensi pemanfaatan ruang darat dan laut, keterhubungan logistik, serta peran pelabuhan terhadap pengembangan wilayah pesisir (Gilek

et al., 2021). Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka integratif yang menghubungkan kesesuaian tata ruang, potensi sumber daya perikanan, prasarana wilayah, kondisi sosial ekonomi, dan kelayakan teknis sebagai dasar penyusunan arahan pengembangan PPN Ambon (Morzaria-Luna et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan dan arahan pengembangan PPN Ambon melalui pendekatan perencanaan wilayah yang mengintegrasikan aspek spasial, teknis, ekonomi, dan potensi wilayah. Secara khusus, penelitian menilai kesesuaian lokasi dan pengembangan pelabuhan terhadap dokumen tata ruang, mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangan, serta merumuskan arahan pengembangan PPN Ambon yang mendukung sistem logistik perikanan dan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

(Adisasmita, 2018; Stephenson et al., 2024) Secara umum pengertian Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan/ lingkungan kerja meliputi areal daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan umum dan jasa guna memperlancar aktifitas kapal perikanan, usaha perikanan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha perikanan. Di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional pengertian Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi pelabuhan perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional.

Pelabuhan perikanan dapat disebut juga sebagai lingkungan kerja yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana dan berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan. Secara faktual pelabuhan perikanan merupakan tempat berlabuh bagi kapal-kapal perikanan yang akan datang dan pergi dari operasi penangkapan ikan, tempat perbaikan kapal dan melindungi kapal dari badai dan cuaca buruk. Oleh karenanya pelabuhan perikanan paling sesuai untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, baik menyangkut aspek teknis, keamanan; permodalan, pasar maupun aspek sosial ekonomi yang lain (Elfandi S.K. 2000).

Lebih lanjut dikatakan (Elfandi, S.K. 2000) bahwa Pengertian lain tentang pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan umum, dan banyak macam rumusannya. Sebagai suatu lingkungan kerja, pelabuhan perikanan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan. Fungsi tersebut meliputi berbagai macam aspek yakni sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan, serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.

Sedangkan Pemerintah memberikan pengertian tentang Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur).

Rangkuti (2004:18) menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi kebijakan. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor faktor strategi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini (Rangkuti, 2004)

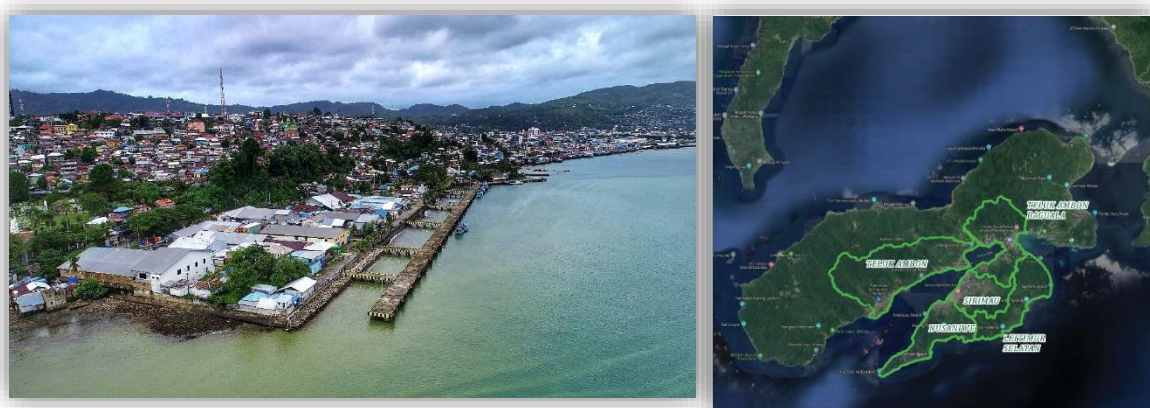
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Letak Kota Ambon berada sebagian besar dalam wilayah pulau Ambon, dan secara geografis terletak pada posisi: 3°- 4° Lintang Selatan dan 128°- 129° Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan jazirah Leihitu dan jazirah Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Trouillet et al., 2019; Rodrigue, 2020) .

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, terletak di Kota Ambon atau Amboina yang merupakan Kota dan Ibukota Propinsi Maluku. Kota ini dikenal juga dengan nama Ambon Manise yang berarti kota Ambon yang indah/manis/cantik, merupakan Kota terbesar di wilayah kepulauan Maluku dan menjadi sentral bagi wilayah kepulauan Maluku. Saat ini kota Ambon menjadi pusat pelabuhan, pariwisata dan pendidikan di wilayah kepulauan Maluku.

Kota Ambon berbatasan dengan Laut Banda disebelah selatan dan dengan kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur (pulau-pulau Lease yang terdiri atas pulau- pulau Haruku, pulau Saparua, pulau Molana, pulau Pombo dan pulau Nusalaut), di sebelah barat (petuanan negeri Hila, Leihitu, Maluku Tengah dan Kaitetu, Leihitu, Maluku Tengah yang masuk dalam kecamatanLeihitu, Maluku Tengah) dan di sebelah utara (kecamatan Salahutu, Maluku Tengah).



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar sehingga memerlukan infrastruktur pelabuhan yang mampu mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diterapkan pemerintah menempatkan pelabuhan perikanan sebagai simpul utama

dalam sistem produksi, distribusi, dan pengawasan hasil perikanan. Latar belakang studi kelayakan PPN Ambon menunjukkan bahwa pengembangan pelabuhan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, terutama karena PPN Ambon ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan pada WPPNRI 714 dengan potensi sumber daya ikan yang besar.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon sangat strategis karena terletak di pusat kota Ambon, Ibukota Propinsi Maluku dengan potensi perikanan sebesar 25 % (1,6 Juta Ton/Thn) dari potensi perikanan nasional (6,5 Juta Ton/Thn) dan dekat dengan sentra perikanan lainnya. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dibangun pada tahun 1984/1985 dengan menggunakan dana APBD dan masih berstatus sebagai PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dengan kategori Type D. Selanjutnya pada tahun 1990/1991 s.d 1995/1996 statusnya diganti menjadi PP (Pelabuhan Perikanan) dengan kategori Type C, yang menggunakan dana APBN dan LOAN ADB INP-22. Kemudian pada tahun 2000 diresmikan menjadi PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) dengan kategori Type B sampai sekarang. Komoditi unggulan PPN Ambon adalah Ikan Cakalang, ikan Tuna, dan ikan Tongkol. Selain tiga Komoditi unggulan tersebut, PPN Ambon juga mengelola Sumberdaya Ikan yang lain seperti Ikan Layang, ikan Kembang, dan Ikan-ikan Demersial lainnya. Pada table berikut disajikan daftar fasilitas yang terdapat di PPN Ambon saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memadukan analisis spasial dan analisis kebijakan. Unit analisis adalah kawasan PPN Ambon dan keterkaitannya dengan sistem ruang darat-laut serta wilayah pelayanan perikanan. Data yang digunakan berasal dari dokumen perencanaan tata ruang, statistik perikanan, regulasi terkait, dokumen studi kelayakan PPN Ambon, serta hasil pengamatan lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi dan kebutuhan pengembangan PPN Ambon terhadap arahan tata ruang dan fungsi pelayanan pelabuhan.

Variabel penelitian terdiri atas:

- Kesesuaian tata ruang;
- Potensi sumber daya ikan;
- Ketersediaan prasarana wilayah;
- Kondisi sosial ekonomi;
- Kondisi oseanografi;
- Kelayakan teknis pelabuhan.

Metode analisis meliputi:

- Analisis spasial GIS;
- Analisis kesesuaian RTRW, RDTR, dan RZWP3K;
- Analisis SWOT;
- Analisis Fishbone;
- Analisis kelayakan teknis;
- Analisis manfaat ekonomi.

Tahapan analisis dilakukan secara berurutan. Pertama, analisis spasial GIS dan telaah RTRW, RDTR, serta RZWP3K digunakan untuk menilai konsistensi lokasi dan fungsi PPN Ambon terhadap arahan tata ruang. Kedua, potensi sumber daya ikan, prasarana wilayah, kondisi sosial ekonomi, kondisi oseanografi, dan kondisi fasilitas pelabuhan digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan pembatas pengembangan. Ketiga, analisis SWOT dan Fishbone digunakan untuk merumuskan permasalahan serta alternatif strategi. Keempat, hasil

analisis tersebut disintesis menjadi arahan pengembangan PPN Ambon. Karena naskah ini menggunakan data sekunder dan hasil studi kelayakan sebagai sumber utama, hasil kelayakan disajikan sebagai sintesis indikatif dan bukan sebagai perhitungan finansial baru.

Tabel 1. Variabel, Indikator, Sumber Informasi, dan Teknik Analisis Kelayakan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

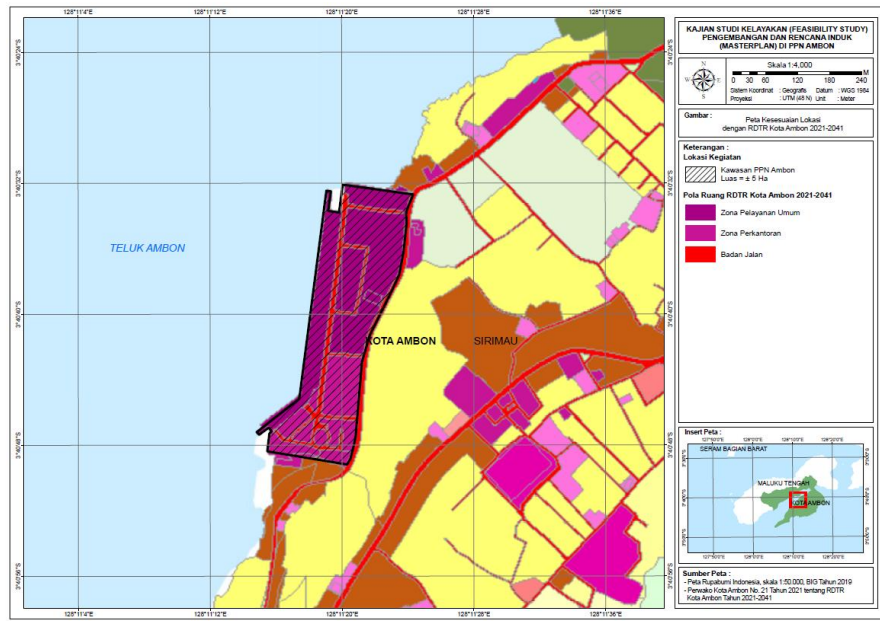
Variabel	Indikator yang Dikaji	Sumber Informasi	Teknik Analisis
Kesesuaian tata ruang	Arahan RTRW, RDTR, dan RZWP3K terhadap lokasi/fungsi PPN	Dokumen tata ruang dan regulasi	Overlay/telaah spasial GIS dan analisis kesesuaian
Potensi sumber daya ikan	Posisi WPPNRI dan potensi komoditas perikanan	Statistik/dokumen perikanan	Analisis deskriptif
Prasarana wilayah dan pelabuhan	Fasilitas pokok, fungsional, logistik, dan akses	Studi kelayakan dan pengamatan lapangan	Analisis kondisi dan kebutuhan
Sosial ekonomi	Peran pelabuhan terhadap kegiatan ekonomi perikanan dan wilayah	Dokumen/statistik wilayah	Analisis deskriptif
Kondisi oseanografi	Kondisi perairan yang berkaitan dengan operasional pelabuhan	Studi kelayakan	Analisis teknis
Strategi pengembangan	Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman	Sintesis seluruh hasil analisis	SWOT dan Fishbone

Sumber: Hasil Analisis 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian dengan rencana zonasi

PPN Ambon masuk pada kawasan Perencanaan RDTR Pusat Kota Ambon, masuk sub Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) D termasuk Kelurahan Pandan Kasturi, dengan Tujuan Penataan Ruang Kawasan Pusat Kota Ambon adalah : “Mewujudkan Kawasan Pusat Kota Ambon sebagai Pusat Pelayanan Perkotaan dengan citra kota berorientasi perairan (Waterfront City), Yang Nyaman, Berkelanjutan dan Tangguh Bencana, didukung oleh Pariwisata dan simpul Transportasi Nasional.



Gambar 2. Kesesuaian Lokasi dengan RDTR

Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pada muatan teknis RZWP-3 K provinsi Maluku adalah rencana susunan pusat pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, yang terdiri dari

1. Susunan pusat pertumbuhan kelautan, meliputi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan dan perikanan
2. Sistem Jaringan prasarana dan sarana laut, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumberdaya air.

Berdasarkan hasil analisis rencana zonasi, maka rekomendasi untuk struktur ruang laut Terkait PPN Ambon sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Struktur Ruang Laut Terkait PPN Ambon.

No.	Muatan	Rencana Pengembangan
1	Pelabuhan Perikanan Ambon	PPN Ambon Kecamatan Sirimau
	Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Eri	CP, Salahutu Maluku Tengah PP Ambon Nusaniwe
2.	Pusat Industri Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Jumlah 2 Perusahaan	Kapasitas 10.380 Ton
3.	Tatanan Pelabuhan Nasional Pelabuhan Utama	Yos Sudarso Ambon.
	Pelabuhan Ambon Baru/New Ambon Port Desa Waai Salahutu	PP No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Batu Merah Pelabuhan Gudang Arang
	Pelabuhan Penyebrangan	Pelabuhan Ferry Galala dan Poka

No.	Muatan	Rencana Pengembangan
	Tersus (Terminal Khusus)	Passo Kota Ambon, Nusaniwe, Telok Ambon (Rumah Tiga, Tawiri, Poka Hunuth, Waiheru, Benteng)
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Kepmen KP No.14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut. Koridor Saumlaki - Ambon

Sumber : Hasil Analisis 2025

Hasil telaah menunjukkan bahwa pengembangan PPN Ambon memperoleh dukungan dari dokumen tata ruang yang digunakan dalam penelitian. Pada RDTR Pusat Kota Ambon, lokasi PPN Ambon berada pada BWP D yang mencakup Kelurahan Pandan Kasturi dan berada dalam kawasan pusat kota yang diarahkan sebagai pusat pelayanan perkotaan berorientasi perairan serta didukung simpul transportasi nasional. Pada muatan RZWP3K Provinsi Maluku, sistem ruang laut mencakup pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta jaringan prasarana dan sarana laut. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga konsistensi antara pengembangan fasilitas pelabuhan, pemanfaatan ruang darat, dan pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, pengembangan PPN Ambon perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem ruang wilayah, bukan semata-mata sebagai proyek peningkatan fasilitas pelabuhan.

Potensi Wilayah

PPN Ambon berada pada WPPNRI 714 dan secara historis juga mendukung aktivitas penangkapan pada WPP 715 dan WPP 718. Posisi tersebut memberikan peran strategis bagi PPN Ambon sebagai simpul pelayanan kapal, pendaratan hasil tangkapan, penyediaan logistik, distribusi, pemasaran, dan pengembangan industri perikanan. Komoditas unggulan yang disebutkan dalam dokumen penelitian meliputi cakalang, tuna, dan tongkol, disertai komoditas lain seperti layang, kembung, dan ikan demersal. Potensi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan. Namun, besarnya potensi sumber daya ikan harus dibaca bersama kapasitas fasilitas, efisiensi operasional, dan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan agar peningkatan aktivitas tidak hanya berorientasi pada volume produksi.

Analisis SWOT.

Berdasarkan sintesis kondisi internal dan eksternal yang teridentifikasi dalam penelitian, faktor SWOT PPN Ambon dapat dirumuskan sebagai berikut:

Strength

- Lokasi strategis.
- Potensi ikan tinggi.
- Dukungan kebijakan nasional.

Weakness

- Keterbatasan fasilitas.
- Efisiensi operasional belum optimal.

Opportunity

- Program Penangkapan Ikan Terukur.
- Peluang ekspor.
- Investasi sektor perikanan.

Threat

- Persaingan pelabuhan lain.

- Perubahan iklim.
- Fluktuasi produksi ikan.

Sintesis strategi SWOT

Strategi SO: memanfaatkan lokasi strategis, potensi sumber daya ikan, dan dukungan kebijakan untuk memperkuat fungsi PPN Ambon dalam program Penangkapan Ikan Terukur, pengembangan pasar, dan investasi sektor perikanan.

Strategi WO: menggunakan peluang kebijakan dan investasi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, meningkatkan kapasitas pelayanan, dan memperbaiki efisiensi operasional pelabuhan.

Strategi ST: memperkuat konektivitas logistik, kualitas pelayanan, dan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan antarpelabuhan dan perubahan kondisi produksi.

Strategi WT: meningkatkan ketahanan fasilitas dan pengelolaan operasional terhadap risiko perubahan iklim dan fluktuasi produksi ikan, disertai penguatan kelembagaan dan koordinasi pengelolaan kawasan.

Implikasi Terhadap Perencanaan Wilayah

Dalam perspektif perencanaan wilayah, pengembangan PPN Ambon tidak hanya berarti peningkatan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga berimplikasi pada struktur ruang, sistem jaringan prasarana, pengembangan kawasan pesisir, dan aktivitas ekonomi wilayah. Peningkatan kapasitas pelabuhan akan meningkatkan kebutuhan konektivitas menuju pusat distribusi, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, serta ruang bagi kegiatan pendukung perikanan. Oleh karena itu, pengembangan PPN Ambon perlu disinkronkan dengan arahan pemanfaatan ruang darat dan laut, sistem transportasi, jaringan utilitas, serta pengendalian dampak lingkungan. Integrasi tersebut diperlukan agar pertumbuhan aktivitas pelabuhan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan tetap mendukung tujuan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon didukung oleh kesesuaian lokasi dan fungsi pelabuhan dengan arahan tata ruang yang dianalisis, potensi sumber daya perikanan, serta dukungan kebijakan nasional. Kedudukannya pada WPPNRI 714 dan perannya dalam mendukung kegiatan perikanan di WPP 715 dan WPP 718 memberikan dasar strategis bagi penguatan fungsi pelabuhan sebagai simpul pelayanan kapal, pendaratan ikan, logistik, distribusi, dan industri perikanan (Elfandi, 2000; Hall, 2014; Briggs, 2013). Namun, keterbatasan fasilitas dan efisiensi operasional yang belum optimal menjadi kendala pengembangan. Oleh karena itu, arahan pengembangan perlu mengintegrasikan pemanfaatan ruang darat dan laut, peningkatan kapasitas fasilitas, penguatan konektivitas logistik, serta koordinasi kelembagaan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan risiko perubahan iklim. Temuan ini merupakan dasar indikatif bagi perencanaan pengembangan dan belum membuktikan kelayakan finansial investasi secara menyeluruh (Branch, 1985).

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer dan data operasional terkini untuk mengukur kebutuhan fasilitas, kapasitas pelayanan, arus pendaratan ikan, serta kinerja sistem logistik PPN Ambon. Kajian perlu dilengkapi dengan analisis kelayakan finansial dan

ekonomi, termasuk estimasi biaya investasi, manfaat pengembangan, dan sensitivitas terhadap fluktuasi produksi maupun biaya operasional (Rangkuti, 2004; Porter, 1998; Hoyle & Pinder, 1992). Penilaian daya dukung lingkungan, kondisi oseanografi, risiko perubahan iklim, serta potensi konflik pemanfaatan ruang juga diperlukan untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan. Selain itu, pelibatan nelayan, pelaku usaha, pengelola pelabuhan, dan pemerintah daerah dapat membantu merumuskan prioritas pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi wilayah. Perbandingan dengan pelabuhan perikanan lain dapat dilakukan untuk menguji keterterapan kerangka integratif tata ruang dan potensi wilayah yang digunakan dalam penelitian ini.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (library research), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskript.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskript.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2018). *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Graha Ilmu.
- Bakker, Y. W., de Koning, J., & van Tatenhove, J. (2019). Resilience and social capital: The engagement of fisheries communities in marine spatial planning. *Marine Policy*, 132–139. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.09.032>
- Branch, M. C. (1985). *Comprehensive City Planning*. American Planning Association.
- Briggs, J. (2013). *The Geography of Development*. Routledge.
- Elfandi, S. K. (2000). *Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Jenderal Perikanan.
- Fauzi, A. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Gramedia.
- Gilek, M., Armoskaite, A., Gee, K., Saunders, F., Tafon, R., & Zaucha, J. (2021). In search of social sustainability in marine spatial planning: A review of scientific literature published

- 2005–2020. *Ocean & Coastal Management*, 208, 105618. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105618>
- Hall, P. (2014). *Cities of Tomorrow* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Hossain, T., Adams, M., & Walker, T. R. (2021). Role of sustainability in global seaports. *Ocean & Coastal Management*, 202, 105435. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105435>
- Hoyle, B. S., & Pinder, D. A. (1992). *European Port Cities in Transition*. Belhaven Press.
- Jefferson, T., Hillman, J. R., & Lundquist, C. J. (2023). Prioritising multiple objectives in marine spatial planning for Aotearoa New Zealand. *Ocean & Coastal Management*, 246, 106886. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106886>
- Li, S., & Jay, S. (2023). Addressing transboundary challenges: Exploring the interactive relations between collaborative governance and transboundary marine spatial planning in Europe. *Marine Policy*, 158, 105880. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105880>
- Morzaria-Luna, H. N., Turk-Boyer, P., Polanco-Mizquez, E. I., Downton-Hoffmann, C., Cruz-Piñón, G., Carrillo-Lammens, T., Loaiza-Villanueva, R., Valdivia-Jiménez, P., Sánchez-Cruz, A., Peña-Mendoza, V., López-Ortiz, A. M., Koch, V., Vázquez-Vera, L., Arreola-Lizárraga, J. A., Amador-Castro, I. G., Suárez Castillo, A. N., & Munguia-Vega, A. (2020). Coastal and Marine Spatial Planning in the Northern Gulf of California, Mexico: Consolidating stewardship, property rights, and enforcement for ecosystem-based fisheries management. *Ocean & Coastal Management*, 197, 105316. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105316>
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.
- Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodrigue, J. P. (2020). *The Geography of Transport Systems (5th ed.)*. Routledge.
- Schwartz-Belkin, I., & Portman, M. E. (2023). A review of geospatial technologies for improving Marine Spatial Planning: Challenges and opportunities. *Ocean & Coastal Management*, 231, 106280. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106280>
- Stephenson, F., Leathwick, J. R., Geange, S., Moilanen, A., & Lundquist, C. J. (2024). Contrasting performance of marine spatial planning for achieving multiple objectives at national and regional scales. *Ocean & Coastal Management*, 248, 106978. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106978>
- Trouillet, B., Bellanger-Husi, L., El Ghaziri, A., Lamberts, C., Plissonneau, E., & Rollo, N. (2019). More than maps: Providing an alternative for fisheries and fishers in marine spatial planning. *Ocean & Coastal Management*, 173, 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.02.016>
- Vasquez Caballero, S., Salgueiro-Otero, D., & Ojea, E. (2023). The Role of Catch Portfolios in Characterizing Species' Economic Linkages and Fishers' Responses to Climate Change Impacts. *Ecological Economics*, 205, 107726. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107726>